



BULETIN PFID

• • • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • • •

PENGELOLAAN DAK INFRASTRUKTUR
DARI SUDUT PANDANG
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR



Mohammad Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAK
INFRASTRUKTUR PUPR

KEGIATAN VERIFIKASI
DATA TEKNIS
JALAN DAERAH TAHUN 2021

SOSIALISASI E-MONITORING DAK
BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR
TAHUN 2021

KICK OFF PELAKSANAAN DAK
INTEGRASI BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke- 5 Januari - Maret Tahun 2021 ini bertema tentang Sosialisasi e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur PUPR Tahun 2021, Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR, dan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR terkait Pengelolaan DAK infrastruktur.

Selamat membaca.

Tim Redaksi

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pelindung

Mohammad Zainal Fatah

Penanggung Jawab

Riono Suprapto

Dewan Redaksi

Anum Kurniawan
Dedy Gunawan
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi

Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi

Hidemiwan, Hery Heryana,
Sari Satria, Desi Meriana,
Irma Rahmawati, Indah
Indriasputri, Leviana Okvianty,
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi

Indra Jaya KGP, Arbisan,
Rani Nur. I , Arif Furqan

Bagian Produksi

Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi

Eka Widya Ningtyas
Didik Santoso

Kontributor

Anum Kurniawan,
Nova Dorma Sirait, Rosita
Darmastuti, Hidemiwan,
Desi Meriana, Indah
Indriasputri, Irma Rahmawati,
Rethon M. Canopy, Indra Jaya
KGK, Brigitta Yolanda, Ranita
Lika, Rizky Ananda, Pujiati
Rahayu, Danang Priambodo,
Afirmia Kitania, Octvia FM

Desain

Prayudi Anggia

Alamat Redaksi

Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
12110,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id



@pusatfid

PENGELOLAAN DAK INFRASTRUKTUR
DARI SUDUT PANDANG
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR

5



RAPAT KOORDINASI
PERSIAPAN VERIFIKASI DATA
TEKNIS
DAN USULAN RENCANA KEGIATAN
DAK BIDANG IRIGASI TA 2022

11



SOSIALISASI PEMANFAATAN
APLIKASI E-PAKSI PADA DAERAH
IRIGASI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH

15



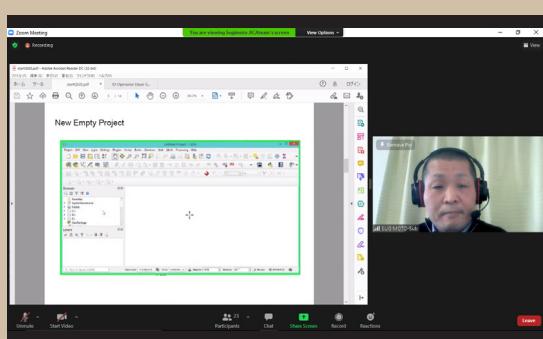
KEGIATAN E-TRAINING GIS
BERSAMA TIM JICA

22



KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEKNIS
JALAN DAERAH TAHUN 2021

19





**KICK OFF PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
INTEGRASI BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN
TA. 2021**

26



**HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PUPR
TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR PUPR
TA. 2021**

32

**KUNJUNGAN LAPANGAN DAK
INTEGRASI BIDANG AIR MINUM,
SANITASI, DAN PERUMAHAN
TA. 2021**

24



**SOSIALISASI E-MONITORING
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TA. 2021
BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR**

29



**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

34

PENGELOLAAN DAK INFRASTRUKTUR DARI SUDUT PANDANG SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR



Oleh : Brigitta Yolanda, Pujiati Rahayu,
dan Tim Buletin PFID

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR memiliki tugas untuk memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemanfaatan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur daerah, khususnya dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah. Peran PFID tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM daerah dan tata kelola penyelenggaraan infrastruktur daerah. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat berbagai kendala dan juga pencapaian target masih ada yang belum tercapai, sehingga PFID harus terus berbenah dalam melaksanakan tugasnya.

"PFID ini merupakan satu unit kerja yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, di mana harus banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah saat bincang santai dengan Kepala PFID, Riono Suprapto dan tim Buletin PFID. Bapak Sekretaris Jenderal banyak memberikan arahan dan masukan mengenai peran dari PFID dalam membina pemerintah daerah di bidang infrastruktur daerah. Ditambahkan juga oleh beliau bahwa PFID harus sangat perhatian dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan DAK setiap tahunnya, seperti memperhitungkan kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur agar tercapai sesuai target nasional.

Alumni Universitas Brawijaya ini dahulu aktif sebagai Asisten Deputi Infrastruktur SDA di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga tentunya memahami bagaimana proses pelaksanaan DAK. Banyak arahan dan pendapat menarik yang disampaikan oleh pria kelahiran Pamekasan lima puluh lima tahun silam ini mengenai penyelenggaraan infrastruktur daerah dan tentunya tentang berbagai kegiatan PFID sendiri dalam pelaksanaan DAK selama ini. Berikut adalah kutipan hasil obrolan singkat dengan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR :



Wawancara Kepala Pusat PFID dengan
Sekretaris Jenderal kementerian PUPR



1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran PUPR pada pembangunan infrastruktur daerah khususnya pengelolaan DAK apakah sudah optimal selama ini? Apakah ada saran?

Menurut saya, infrastruktur yang merupakan wewenang daerah pada faktanya menjadi tanggung jawab secara fungsional bagi Kementerian PUPR. Misalkan ada kerusakan infrastruktur di level provinsi atau kabupaten, yang ditanya adalah Kementerian PUPR. Oleh karena itu DAK harus kita jadikan bagian dari resources utama untuk menyelesaikan masalah infrastruktur daerah. Karena kita menempatkannya seperti itu, maka kita harus taking care sejak dari awal tahap perencanaan sampai implementasi. DAK itu merupakan bantuan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, sehingga kementerian ha-

rus tahu secara rinci tahapannya, tidak asal deliver saja uangnya. DAK merupakan satu segmen dari proses pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan capacity building serta kita harus mendorong dan memberikan challenge kepada

daerah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memiliki jiwa championship atau tidak. Bagi pemerintah daerah yang dapat melaksanakan kegiatan dengan baik patut diberi reward.



2. Bagaimana sinergi dan kerjasama antara PUPR dan K/L lain (Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri) dalam pengelolaan DAK?

Kerjasama antar K/L sebenarnya adalah suatu keniscayaan,

sudah clear, kedepannya akan jelas juga. Teknologi informasi saat ini sangat memudahkan kerjasama satu sama lain. Dengan cara tersebut kita dapat bekerja lebih efektif dan dapat mengoreksi pekerjaan satu sama lain.

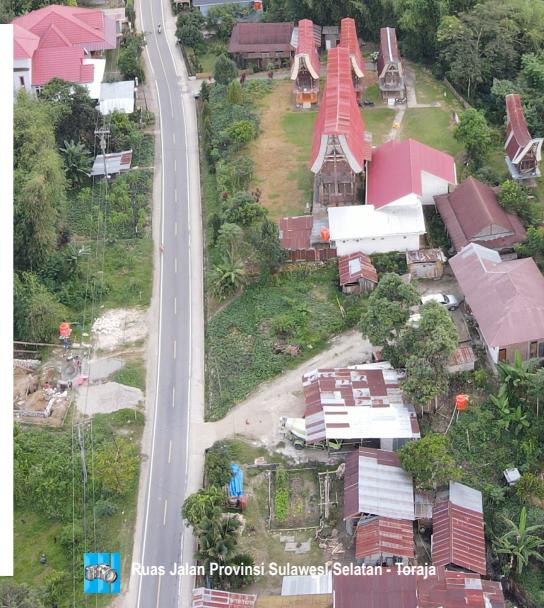
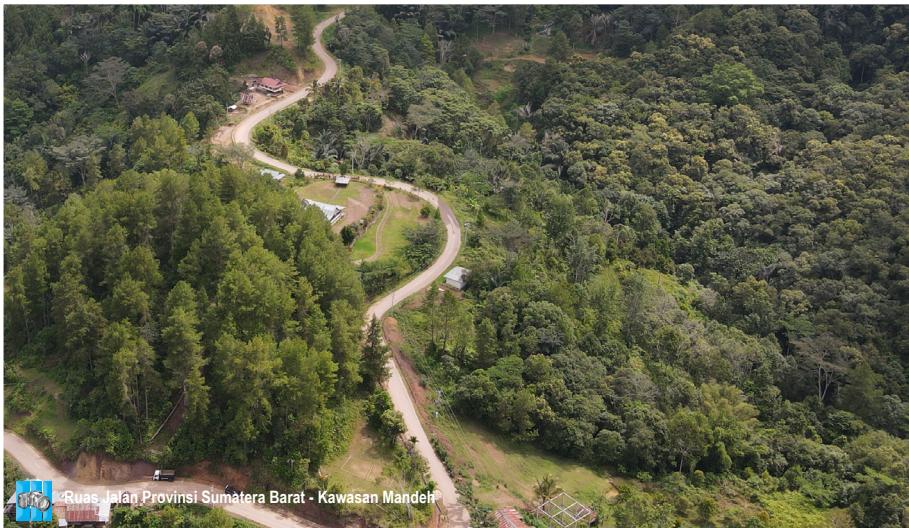
**Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR
Mohammad Zainal Fatah :**

“DAK Sebagai Bagian dari Resources Utama untuk Menyelesaikan Permasalahan Infrastruktur Daerah”

dilihat dari peraturan perundangan apapun kita harus saling bekerjasama, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan kolaborasi dan networking yang baik. Kolaborasi dan kerjasama dilakukan untuk membangun atau mencapai mutual understanding dan mutual commitment. Bisa saja tidak sepakat satu sama lain tapi diusahakan untuk sepaham sepanjang kita bisa menjaga kolaborasi dan network. Network bisa dibangun di setiap level. Salah satu contoh nyata ialah pada kolaborasi data. Kolaborasi data menurut saya dasar untuk kita dapat membangun kesepakatan dan kesepahaman bersama. Jika data

3. Kementerian PUPR melalui DAK telah memberikan dukungan terhadap pencegahan stunting dan penanganan kumuh. Bagaimana harapan dan saran Bapak agar DAK dapat berkontribusi dalam penanganan kumuh dan pencegahan stunting?

Sebelumnya kita tidak pernah bicarakan stunting, namun saat ini pembangunan di berbagai sektor secara intens dikaitkan dengan stunting. Secara statistik hubungan antara pembangunan atau akses



terhadap air minum dengan stunting pasti tinggi. Pada saat aksesibilitas terhadap air minum rendah pasti stuntingnya tinggi. Kalau dalam ekonometrik keduanya merupakan variabel yang multikolinier. Berdasarkan statistik, hal yang paling mempengaruhi stunting lebih besar berasal dari faktor non kesehatan, salah satunya infrastruktur. Dari faktor kesehatan sendiri hanya mengambil andil kurang lebih 30% untuk masalah stunting ini. Jadi menurut saya, sudah pasti dengan adanya DAK ini akan memberikan pengaruh terhadap stunting, dengan memperbanyak akses untuk air minum bersih di daerah-daerah yang membutuhkan.

4. Kementerian PUPR bersama dengan Bappenas untuk tahun ini memiliki inovasi yaitu megintegrasikan DAK Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman untuk menyelesaikan permasalahan kawasan permukiman kumuh. Bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep DAK integrasi untuk kedepannya?

Konsep DAK Integrasi ini tentunya baik. Konsep ini sebetulnya membuat detail implementasi dari

konsep-konsep pengembangan kawasan. Konsep pengembangan kawasan ini sebetulnya sudah ada dari lama seperti misalnya Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain. Itu semua sebenarnya konseptualisasinya adalah bagaimana membangun berdasarkan basis kawasan. Dengan basis kawasan maka kita akan lebih mudah mengkonvergensi. Ini merupakan kesempatan yang baik, oleh karena itu kata kuncinya adalah membangun apa yang menjadi concern atau main indicator. Untuk urusan di daerah kita harus memberdayakan Bappeda sebagai integrator, yang harus kita perhatikan adalah siapa integratornya, bisa personal atau suatu entitas tertentu.

5. Mengenai keterkaitan antara alokasi DAK Bidang Jalan yang didapatkan dengan pencapaian target kemantapan jalan daerah sesuai dengan RPJMN 2019-2024, kira-kira bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar target pencapaian kemantapan dapat tercapai dengan alokasi DAK Bidang Jalan?

Bidang Jalan tentunya harus menghitung nilai kebutuhan dari seluruh ruas jalan daerah yang masih dalam kondisi rusak. Kemudian dilihat kembali akibatnya jika ternyata ruas jalan yang rusak itu tidak ditangani, maka pastinya kebutuhan tahun depan akan menjadi lebih besar. Pemerintah daerah harus dapat memberikan data ruas mana saja yang perlu ditangani agar nilai kemantapan dapat naik. PFID bisa memberikan informasi ini kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar alokasinya sesuai. Namun jika pada kenyataannya tidak mendapatkan alokasi yang dibutuhkan, ya harus dimaksimalkan pada penanganan kegiatan tematik pada lokasi-lokasi khusus. Teman-teman di PFID ini kan sebenarnya perencana, jadi lebih baik banyak melakukan exercise perhitungan. Tapi untuk data, pemerintah daerah pasti memiliki RPJMD masing-masing, tinggal mintakan saja dengan membuat kuisioner singkat dan diminta foto sebagai bukti kebutuhan mereka. Cari cara saja yg lebih simple, yang penting adalah dapat diimplementasikan.



6. Pembinaan seperti apa yang dapat dilakukan PFID, terutama terkait dengan kegiatan verifikasi data teknis yang sebenarnya akan mempengaruhi pengalokasian DAK setiap tahunnya?

PFID harus memiliki media yang tepat dalam menyampaikan informasi. Selama ini menggunakan apa? Jika masih menggunakan grup Whatsapp, harap dimaksimalkan. Hal terpenting adalah komunikasi yang baik dari PFID dengan pemerintah daerah. Selain itu jadikan proses pelaksanaan DAK ini sebagai kompetisi bagi pemerintah daerah. Berikan rewards kepada daerah yang berhasil melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal yang lain mungkin bisa bersurat secara rutin tentang batas waktu verifikasinya, kemudian memberikan penalti jika lewat dari batas waktu. Sampaikan peringatan-peringatan dan punishment yang jelas kepada pemerintah daerah tersebut.

7. Apa ada kiat-kiat khusus dan inovasi yang dapat dilakukan oleh Bidang Irigasi dalam pengelolaan DAK untuk mencapai ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan?

Irigasi ini perlu dilihat diintegrasikannya dengan apa saja. Jadi, misal ada pekerjaan rehabilitasi irigasi, tapi ternyata ketersedia-



an pupuk dan benihnya tidak ada akan jadi percuma, tidak mungkin berhasil menuju ketahanan pangananya. Apalagi ini merupakan kegiatan tematik, sehingga harus memiliki integratornya, dan Kementerian PUPR ini harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Berdasarkan studi antropologi, pembangunan irigasi biasanya akan mengalienasi petani dengan lahannya, memisahkan biasanya. Maksudnya adalah jika sudah ada bangunan irigasi, namun ternyata ketersediaan pupuk dan benih kosong, tentu petani pun akan me-

rasa kesulitan. Padahal dengan ketersedian air, maka produktivitas juga menjadi tinggi. Tapi jika tidak ada modal pupuk dan benih, petani akan bingung. Mereka akan mencari investor-investor untuk menyewa lahan mereka karena biasanya nanti pajak antara lahan beririgasi lebih tinggi dari pajak lahan non irigasi. Tidak ada modal, namun mereka harus membayar pajak yang tinggi. Banyak kasus jadinya yang menikmati hasil pertanian itu bukan petani langsung, tetapi "petani berdasi". Sehingga untuk menghindari hal ini, dalam



DAK Sanitas TA.2019
Pembangunan TPS 3R Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kab. Bandung



DAK Sanitas TA.2019
Pembangunan IPAL 50KK di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kab. Bantul.



DAK Air Minum TA.2020
Pengembangan Jaringan Perpipaan di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

perencanaan kegiatan DAK harus dilihat kembali aspek-aspek tersebut. Itu merupakan hal yang paling sederhana dalam melakukan perencanaan DAK Bidang Irigasi.

8. Terdapat beberapa aplikasi di bidang-bidang pelaksana PFID yang membantu dalam pelaksanaan DAK, seperti SiPDJD di Bidang Jalan, e-Paksi untuk Bidang Irigasi, dan e-Monitoring DAK untuk kegiatan pemantauan, namun banyak pemda tidak tertib dalam penggunaan aplikasinya. Apa arahan Bapak kepada Pemda dan juga saran bagi PFID agar dapat mewujudkan pemda yang tertib dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan tersebut?

Teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Diusahakan dengan terus mengembangkan aplikasi yang ada, bisa saja aplikasi tersebut dibuat compatible dengan handphone dan memberikan notifikasi kepada penggunanya. Jadi dari notifikasi yang muncul dari handphone akan langsung dibaca sendiri oleh pemerintah daerah. Isi notifikasi bisa warning dengan tulisan "Harap segera mengisi, jika telat akan dikenakan sanksi pemotongan indeks." Kita tidak boleh kaku dalam menghadapi

teknologi, harus ikut terus dengan perkembangannya. Apalagi sudah banyak anak-anak muda di PFID, harus bisa memberikan inovasi tambahan pada aplikasi yang sudah ada tersebut.

9. Bagaimana arahan Bapak bagi kami dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan DAK tetap berjalan efektif dan tertib di masa pandemi Covid-19 saat ini?

Menurut saya hal ini bukan merupakan suatu hal yang benar-benar menghalangi kegiatan. Saat ini sudah dibentuk Tim Satgas Covid-19 yang tentunya sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mengatasi pandemi dengan terus mengingatkan protokol kesehatan dan sebagainya. Menurut saya kondisi saat ini ada mitigasinya, apalagi kita juga sudah memiliki protokol dalam pelaksanaan infrastruktur. Namun karena pandemi ini memengaruhi banyak sektor, maka kita buat DAK ini menjadi hal yang dapat mendorong perbaikan ekonomi. Contohnya adalah peningkatan persentase tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Rumusannya ini mudah, bisa ditambahkan pada Petunjuk Operasional DAK, agar menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk mendukung Pemulihian Ekonomi Nasional.



10. Apa harapan Bapak untuk PFID dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan DAK untuk pencapaian infrastruktur daerah dan tata kelola di daerah yang lebih baik?

PFID merupakan entitas yang berbeda dari yang lain, maka PFID harus memiliki kemampuan untuk kolaborasi yang intens dengan melibatkan stakeholder yang beragam. PFID mengupayakan kegiatan yang mempertemukan stakeholder tersebut, karena dengan banyak momen pertemuan maka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul berkatit dengan infrastruktur daerah. Diskusi kita sebelumnya banyak membicarakan perencanaan DAK yang matang, tidak lupa juga harus melakukan monitoring dengan baik. Tinggalkan cara konvensional, lebih banyak lakukan perkembangan memanfaatkan teknologi seperti geotagging dan foto pada aplikasi di handphone. Tidak perlu menghabiskan tenaga ke lapangan, PFID dapat memantau dari kantor, pemerintah daerah yang mengisi aplikasi tersebut. Kemudian harus terus melakukan perbaikan tata kelola dari hal-hal yang sudah dilaksanakan selama ini, sehingga dapat mencapai penyelenggaraan infrastruktur daerah yang lebih baik *

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN VERIFIKASI DATA TEKNIS DAN USULAN RENCANA KEGIATAN (URK) DAK BIDANG IRIGASI TA 2022

Oleh : Nova Dorma Sirait, Indah Indriaspriuti,
dan Danang Priambodo



RAPAT PERSIAPAN VERIFIKASI DATA TEKNIS DAN USULAN RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG IRIGASI TA. 2022

KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Jakarta, 09 Februari 2021



Paparan Rapat Persiapan Verifikasi Data Teknis dan Usulan RK DAK Bidang Irigasi TA. 2022

Restrukturisasi organisasi Kementerian PUPR melalui Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 yang merupakan penggantian atas Permen PUPR Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR mengamanatkan pembentukan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) c.q. Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi dan pela-

poran penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur sumber daya air daerah, khususnya yang dilaksanakan melalui DAK. Adapun susunan organisasi Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Dalam rangka sharing informasi dan pembinaan kepada daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, PFID menyelenggarakan 'Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Bidang Irigasi TA 2022' secara daring

pada Selasa, 9 Februari 2021 dengan mengundang lebih kurang 37 BBWS/BWS dan 482 Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan daerah irigasi se-Indonesia. Rapat Koordinasi ini merupakan awal dari serangkaian kegiatan terkait penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022 ke depan. Pada kesempatan tersebut hadir narasumber dari lintas K/L, meliputi: Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR.



Peserta Rapat Persiapan Verifikasi Data Teknis dan Usulan RK DAK Bidang Irigasi TA. 2022



Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan

Menilik penyelenggaraan DAK periode sebelumnya, alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2021 ditepatkan sebesar Rp 3 T, namun hanya Rp 2,9 T (96,70%) yang dapat terserap. Mekanisme penyaluran DAK Fisik dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap atau campuran sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

DAK Fisik TA 2021 diarahkan untuk mendukung program padat karya sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19 yang masih sangat dirasakan oleh per ekonomian masyarakat. DAK Fisik diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan swakelola, padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal.



Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman DWAerah, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi



Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas

Kondisi jaringan irigasi di Indonesia saat ini mayoritas termasuk dalam kategori rusak dengan laju penurunan jumlah petani per tahun yang cukup signifikan. Rerata upah

Pemerintahan Daerah (SIPD) pengelolaan keuangan daerah saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi SIPD dengan pedoman teknis yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada aplikasi SPID juga sudah terdapat peta-

an (mapping) menu kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2021, meliputi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir.

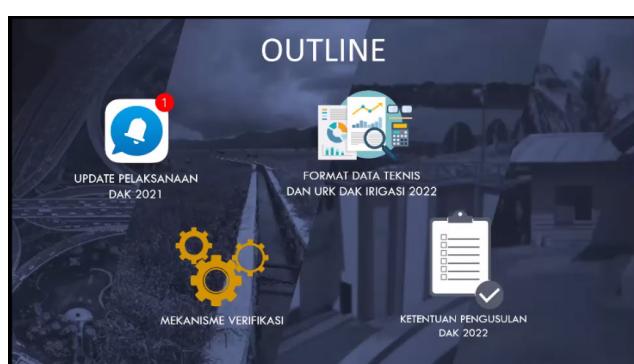


dapat membantu meningkatkan pendapatan petani berpenghasilan rendah. Selain itu diperlukan pula percepatan pelaksanaan e-PAK-SI untuk mendukung pengelolaan daerah irigasi kewenangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi ke depan, dilakukan pendekatan berupa: 1) perluasan lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi; 2) penerapan prinsip partisipatif dalam pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi; 3) perbaikan perencanaan usulan DAK Fisik Bidang Irigasi oleh Pemerintah Daerah dan aspirasi DPR RI serta 4) pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam program DAK Ketahanan Pangan.



buruh per bulan di sektor pertanian paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Menimbang hal tersebut, implementasi prinsip partisipatif dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Irigasi perlu digalakkan. Pelaksanaan DAK secara partisipatif



Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, PFID, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR

Dalam pengusulan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melengkapi format data teknis

irigasi dan infrastruktur pengendali banjir serta mengunggahnya dalam aplikasi e-Mon DAK paling lambat pada tanggal 5 Maret 2020. Diperlukan verifikasi manual (offline) oleh Dinas PUPR Provinsi dan BBWS/BWS sebelum diunggah

dan verifikasi daring/online setelah diunggah ke dalam aplikasi e-Mon DAK. Selain format data teknis, Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan dokumen teknis sebagai readiness criteria usulan DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022.





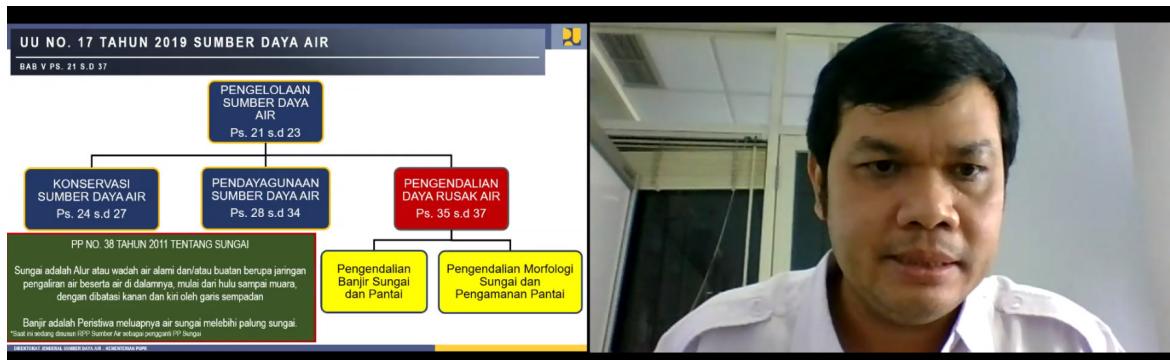
Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi didefinisikan sebagai berikut: 1) Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi

di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya; 2) Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi dan 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Dokumen teknis yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Daerah untuk menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, diantaranya: 1) Laporan SID dan DED; 2) Surat kelayakan AMDAL/UKL-UPL; 3) Skema jaringan dan bangunan daerah irigasi; 4) Peta geospasial lahan sawah; 5) Back up volume pekerjaan; 6) RAB dan KAK; 7) SMK3; 8) Standarisasi harga barang dan jasa; 9) Surat pertanggungjawaban mutlak; 10) Surat pernyataan tuntas dan 11) DPA khusus O&P irigasi. Khusus untuk menu Pembangunan Jaringan Irigasi terdapat tambahan 12) Surat pernyataan penyediaan dan penyiapan lahan dan 13) Surat pernyataan pemenuhan kriteria pembangunan jaringan irigasi.

• • •



Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR

DAK Infrastruktur Pengendali Banjir diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan tanggul, perkuatan tebing dan kolam retensi. Pembangunan baru tanggul dan perkuatan tebing sungai dilakukan dengan persyaratan sekurang-kurangnya: 1) Belum adanya bangunan pengendali banjir; 2) Memiliki areal terdampak yang cukup luas; 3) Tidak terdapat permasalahan pengadaan tanah dan 4) Memiliki desain debit banjir rencana sesuai dengan lokasi kegiatan. Pembangunan tanggul

dan perkuatan tebing sungai juga harus dapat menerima debit banjir rencana sesuai dengan desain dan di atas debit banjir rencana eksisting. Pembangunan kolam retensi harus memiliki lahan yang tersedia dan sudah dilakukan pembebasan lahannya serta perlu memperhitungkan persentase pengurangan elevasi muka banjir akibat adanya kolam retensi tersebut.

Dalam mengajukan usulan menu Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, Pemerintah Daerah harus memperhatikan: 1) Ketuntasan kegiatan yang diusulkan; 2) Nilai kegiatan yang rasional (mempertimbangkan kemampu-

an penyerapan dalam satu tahun anggaran) dan 3) kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan. Dokumen teknis yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Daerah untuk menu Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, diantaranya: 1) Laporan SID dan DED; 2) Surat kelayakan AMDAL/UKL-UPL; 3) Back up volume pekerjaan; 4) RAB dan KAK; 5) SMK3; 6) Standarisasi harga barang dan jasa; 7) Surat pertanggungjawaban mutlak; 8) Surat pernyataan penyediaan dan penyiapan lahan; 9) Peta genangan banjir dan 10) Data kerusakan dan kerugian dari BPBD *



SOSIALISASI PEMANFAATAN APLIKASI E-PAKSI PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh : Nova Dorma Sirait, Irma Rahmawati,
dan Octvia Fajrin Mustikaningtyas

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Tujuan dari DAK sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ialah untuk membantu Daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Sejalan dengan arah kebijakan DAK bidang Irigasi, e-PAKSI sebagai inovasi dalam

pengelolaan jaringan irigasi diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam proses penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi. Melalui pelaksanaan survei e-PAKSI dapat diketahui kondisi, sistem kinerja, kebutuhan pembiayaan dan rekomendasi prioritas penanganan serta peningkatan sistem kinerja irigasi dari suatu aset jaringan irigasi dan aset pendukung pengelolaan irigasi secara terintegrasi dalam suatu daerah irigasi. Untuk itu diharapkan ke depan dapat diperoleh kegiatan yang benar-benar efektif, efisien serta tepat guna dan sasaran, khususnya untuk menu rehabilitasi jaringan irigasi.

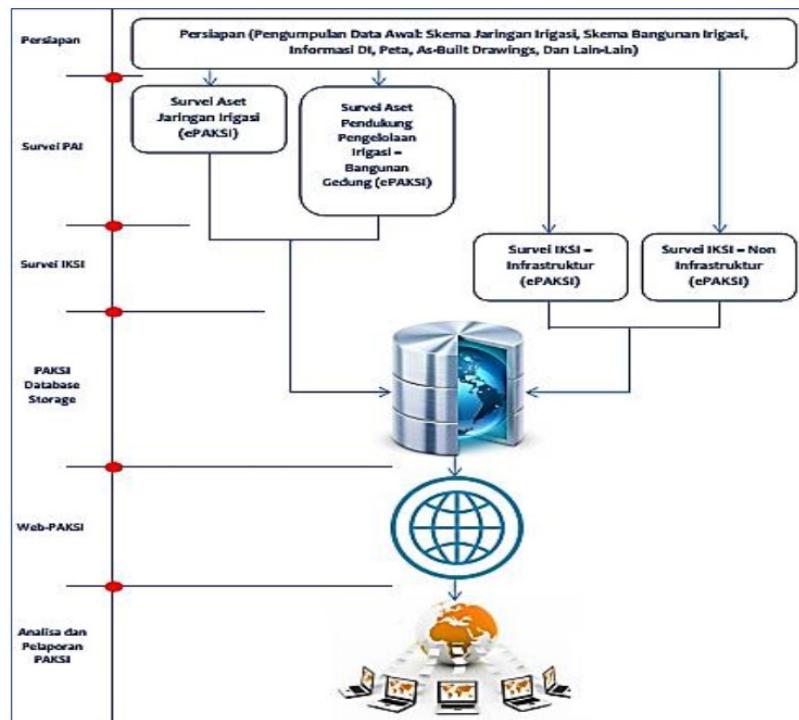
Dalam rangka mendukung pelaksanaan e-PAKSI sebagai kriteria pengusulan DAK TA. 2022 Bidang Irigasi, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, PFID menyelenggarakan ‘Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-PAKSI

pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah’ secara daring dimulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021 dengan mengundang lebih kurang 37 BBWS/BWS dan 482 Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan daerah irigasi se-Indonesia.

Pelaksanaan ‘Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-PAKSI pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah’ terbagi atas 3 gelombang, dimana gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 yang dihadiri oleh BBWS/BWS dan Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera, dengan prosentase kehadiran peserta sebesar 67%. Gelombang kedua dilaksanakan tanggal 19 Januari 2021 yang dihadiri oleh BBWS/BWS dan Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota se-Pulau Jawa dan Kalimantan dengan pro-



TAHAP PELAKSANAAN ePAKSI



sentase kehadiran peserta 66%. Sedangkan untuk gelombang ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 yang dihadiri oleh BBWS/BWS dan Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota se-Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dengan prosentase kehadiran peserta 54%.

Pelaksanaan e-PAKSI memiliki maksud dan tujuan yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan baseline dan/atau PAI dan IKSI secara terintegrasi dalam suatu Daerah Irigasi (DI), efektifitas dan efisiensi pelaksanaan OP sistem irigasi dapat tercapai secara berkelanjutan, mengetahui kondisi aset jaringan irigasi dan aset pendukung pengelolaan irigasi di setiap DI melalui kegiatan baseline dan update PAKSI, mengetahui kinerja sistem irigasi utuh, irigasi utama dan irigasi tersier pada setiap DI, menghitung kebutuhan pembiayaan, menentukan rekomendasi prioritas penanganan dan pengelolaan sistem dan sub

sistem irigasi setiap DI, menentukan rekomendasi prioritas penanganan dan pengelolaan sistem dan sub sistem irigasi setiap DI., serta dalam pelaksanaan e-PAKSI mempertimbangkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pekerjaan (Waktu, SDM, Biaya, dan Produk) berdasarkan Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 dan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015.

Pelaksanaan kegiatan PAI dan IKSI secara integrasi dalam suatu Daerah Irigasi melalui e-PAKSI diharapkan tercapainya efisiensi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan yang berkelanjutan karena penggunaan e-PAKSI lebih efisien waktu, selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi SDM dengan modernisasi surveyor untuk PAI dan IKSI, melalui e-PAKSI Pemda dapat mengetahui efektifitas produk, hingga dapat menghemat biaya karena e-PAKSI tidak menggunakan kertas (paperless) dan tidak membutuhkan surveyor berlebih.

Tahapan pelaksanaan e-PAKSI terdiri dari kegiatan persiapan, Survey PAI, Survey IKSI, PAKSI database storage, web e-PAKSI dan Analisa pelaporan PAKSI. Data hasil e-PAKSI dalam pengelolaan irigasi digunakan untuk mengetahui peningkatan kinerja sistem irigasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pengelolaan Irigasi.

Dalam mempersiapkan penggunaan e-PAKSI untuk pengelolaan aset dan Kinerja Irigasi, perangkat yang digunakan untuk e-PAKSI baik survei maupun web harus memenuhi spesifikasi tertentu supaya e-PAKSI dapat digunakan secara maksimal. Pelaksanaan e-PAKSI harus dilakukan sesuai dengan metodologi pelaksanaannya, yaitu dimulai dari persiapan survei, survei lapangan, dan pelaporan data. Penyiapan data irigasi berupa registrasi data irigasi, subsistem irigasi dan skema jaringan irigasi, pengambilan foto harus memperhatikan tampak keseluruhan ba-

Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-PAKSI Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah

Gelombang III

KEPALA PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Jakarta, 20 Januari 2021

 Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Paparan Kepala Pusat FID

ngunan dan sekitar bangunan (denah lokasi), tampak detil bangunan dan tampak detil kerusakan perlu dilakukan terlebih dahulu. Kegiatan PAI dan IKSI dapat dilakukan secara bersamaan pada tahun kedua untuk efisiensi waktu dan tenaga. Untuk IKSI dan PAI tidak dapat dilakukan bersamaan pada tahun pertama dikarenakan harus melakukan pendataan asset terlebih dahulu (PAI) baru kemudian IKSI. Apabila ada perubahan pada PAI, maka harus di update pada saat survei IKSI tahun kedua. Data Panjang Saluran dan Luas Petak Tersier harus diinput secara manual dan tidak menggunakan formulasi perhitungan panjang atau luas berdasarkan obyek petanya, apabila saat survei tidak ditemukan adanya bangunan air maka dianggap saluran non teknis dan perlu diusulkan adanya pembangunan (bangunan sederhana, misalkan bangunan bagi). Jika tidak ada ba-



ngunan airnya maka tidak bisa dinilai di e-paksi karena alirannya tidak bisa terukur. Sinkronisasi Data dilakukan setelah survei lapangan dilakukan di kantor dengan menggunakan WIFI berkecepatan tinggi atau dalam jaringan 4G yang kecepatannya tinggi.

Pada acara ini juga dibahas mengenai pengelolaan asset irigasi guna memaksimalkan fungsi dari prasarana yang dilakukan secara efisien dan efektif. Dilihat dari definisinya, pengelolaan asset irigasi merupakan proses manajemen yang terstruktur, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam

mengelola dan mendayagunakan asset irigasi yang meliputi: inventarisasi asset, perencanaan pengelolaan asset, pelaksanaan pengelolaan asset, monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data asset. Dimana asset irigasi terdiri dari Jaringan Irigasi yang meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi yang meliputi kelembagaan pengelola irigasi; SDM secara kualitas dan kuantitas; dan fasilitas

Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi e-PAKSI pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemda Wilayah Barat

Update Pelaksanaan DAK 2020 - Pelaporan

Rekapitulasi Pelaporan Penyerapan Tenaga Kerja DAK 2020

No	Wilayah	Jumlah Pemda	Jumlah Pemda Lapor
1	Wilayah Barat	118	13
2	Wilayah Tengah	135	19
3	Wilayah Timur	121	13
	Total	374	45

Rekapitulasi Pemda Melapor Penyerapan Tenaga Kerja

Wilayah	Pemda Penerima DAK 2020	Pemda Lapor Penyerapan Tenaga Kerja
Wilayah Barat	118	13
Wilayah Tengah	135	19
Wilayah Timur	121	13

Pemda yang sudah melapor Penyerapan Tenaga Kerja DAK 2020

No	Nama Pemda	No	
1	Kota Gurungsitoli	24	Provinsi Kalimantan Utara
2	Kab. Karo	25	Kab. Balangan
3	Kab. Mandailing Natal	26	Kab. Banjar
4	Kab. Deli Serdang	27	Kab. Hulu Sungai Selatan
5	Kota Payakumbuh	28	Kab. Hulu Sungai Tengah
6	Kab. Kuantan Singgingi	29	Kab. Kotabaru
7	Kab. Rokan Hulu	30	Kab. Tapin
8	Kab. Kapuas Hulu	31	Kab. Tanah Laut
9	Kab. Belitung Timur	32	Kota Samarinda
10	Kab. Bangka Tengah	33	Provinsi Nusa Tenggara Barat
11	Kab. Pringsewu	34	Kab. Bima
12	Kab. Way Kanan	35	Kab. Dompu
13	Kab. Lampung Barat	36	Kab. Lombok Tengah
14	Kab. Slawi	37	Kab. Lombok Timur
15	Kab. Blora	38	Kab. Lombok Utara
16	Kab. Demak	39	Kab. Sumbawa
17	Kab. Semarang	40	Kota Bima
18	Kota Salatiga	41	Kota Mataram
19	Kab. Bojonegoro	42	Kab. Minahasa
20	Kab. Lamongan	43	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
21	Kab. Madiun	44	Kota Kendari
22	Kab. Ponorogo	45	Kab. Halmahera Selatan
23	Kab. Landak		

Status : 17 Januari 2021, Pukul 15.00 WIB

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PENGELOLAAN IRIGASI DENGAN E-PAKSI

ZOOM

Paparan Narasumber

pendukung seperti rumah, lahan, dan lainnya. Kegiatan inventarisasi aset meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset, dalam melakukan inventarisasi aset irigasi harus sesuai dengan formulir isian. Apabila PAI sudah dilakukan pada tahun sebelumnya namun masih ada ruas maupun aset yang belum terdata, dapat diperbaiki karena kegiatan pendataan maupun updating e-PAKSI dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kondisi terkini daerah irigasi, bukan hanya menunggu jika ada kerusakan ataupun perubahan.

Menilisik lebih dalam, penilaian

Indeks Kinerja Sistem Irigasi bermafsud untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana irigasi, besarnya produktivitas tanaman, ketersediaan dan kemanfaatan sarana penunjang, kondisi dan kelengkapan dokumentasi, serta kondisi dan kinerja P3A/GP3A/IP3A, dan memiliki tujuan untuk memberikan data tentang kinerja sistem irigasi setiap daerah irigasi kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun/menentukan program tindak lanjut. Prioritas utama bobot penilaian irigasi didasarkan

pada Aspek Kondisi Prasarana Fisik, Aspek Produktifitas Tanam, Aspek Sarana Penunjang, Aspek Organisasi Personalia, Aspek Dokumentasi, dan Aspek kondisi P3A. Penilaian kinerja sistem irigasi dilakukan berdasarkan pada Kinerja Sistem Irigasi Utama dan Kinerja Sistem Irigasi Tersier.

Selain membahas mengenai e-PAKSI secara teknis, dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai permasalahan dan solusi dalam pemanfaatan aplikasi e-PAKSI pada Daerah Irigasi kewenangan daerah, salah satu contoh masalah pada e-PAKSI yaitu proses pengambilan data kerusakan dilakukan melalui pencatatan formulir secara lengkap kemudian pengisian IKSI pada e-PAKSI dilakukan di back office berdasarkan data yang telah dicatat di lapangan, pada kasus ini aplikasi hanya akan mendeteksi koordinat pada saat pengisian, namun jika kondisi tidak memungkinkan maka dapat disesuaikan namun tetap harus menyertakan bukti-bukti yang konkret *



 Verifikasi Data Teknis Bersama Dinas PU Binamarga
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis

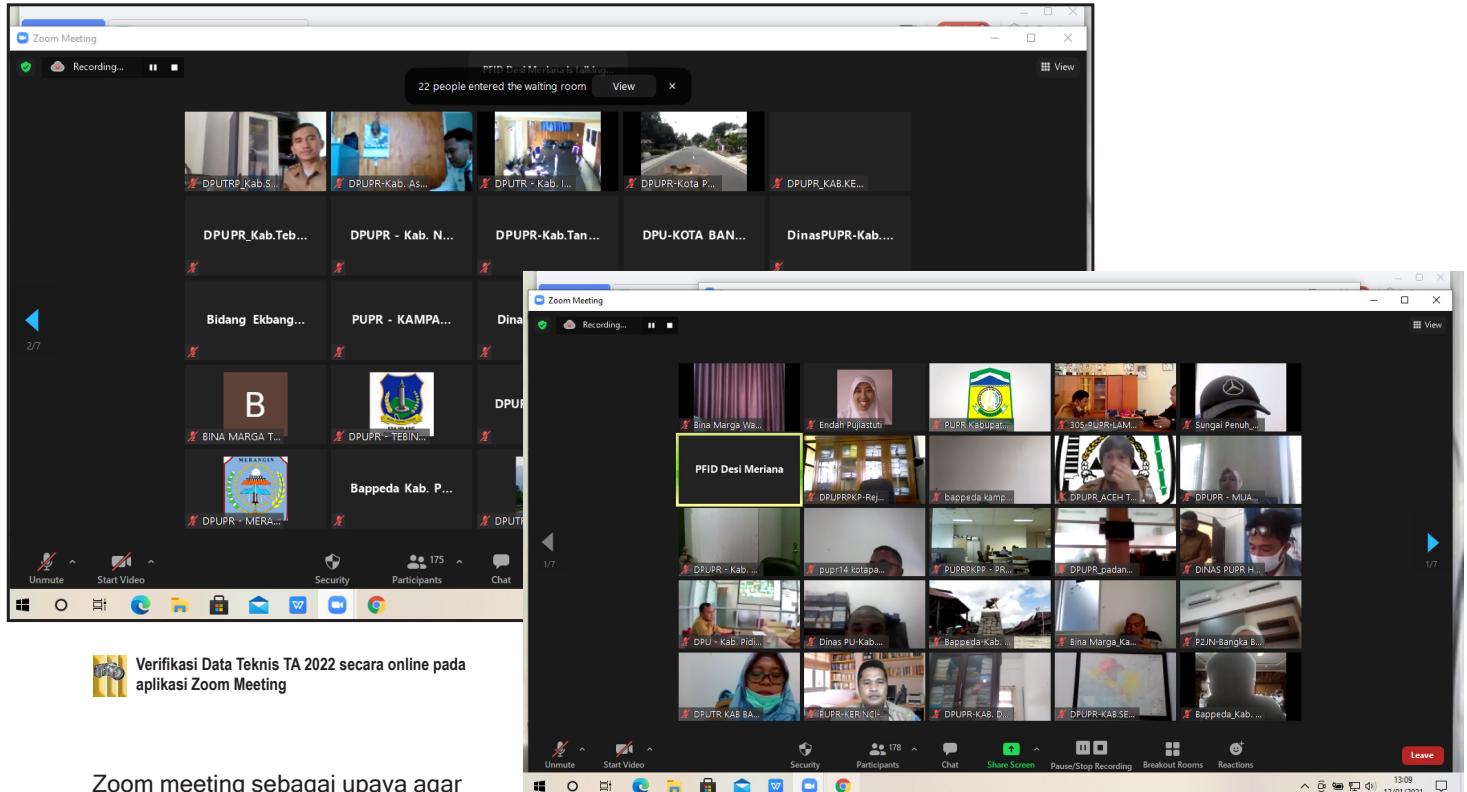
KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEKNIS JALAN DAERAH TAHUN 2021

Oleh : Ranita Lika D., ST.,
Brigitta Yolanda P.P., ST.

Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Bidang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Jembatan, PFID. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Perencanaan yang merupakan tugas dari Subbidang Perencanaan dan Pemrograman Bidang Jalan dan Jembatan. Penyampaian data teknis jalan daerah yang dilakukan oleh SKPD ini sebagai persiapan awal menuju Usulan Rencana Kegiatan DAK TA. 2022. Terdapat beberapa tujuan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

1. Kesesuaian dokumen antara data persentase APBD yang disampaikan dengan dokumen dana APBD seperti DPA Bidang Jalan dan Perda Pemerintah Daerah mengenai Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Kesesuaian dokumen antara data koneksi yang disampaikan dengan data jalan yang sudah terbangun dan rencana jalan yang akan dibangun. Rencana jalan yang dibangun dilihat dari master plan dan RPJMD.
3. Kesesuaian dokumen antara data panjang jalan yang disampaikan dengan SK Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengenai ruas jalan yang berlaku atau dalam proses penetapan.
4. Kesesuaian dokumen antara data kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) dengan data DD1 (database jalan) akhir tahun n-1 pada kolom kondisi ringan dan rusak berat.

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 18 Gelombang, diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2021 - 4 Februari 2021 dengan mengundang 541 SKPD menggunakan videoconference aplikasi



Verifikasi Data Teknis TA 2022 secara online pada aplikasi Zoom Meeting

Zoom meeting sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan ini tetap terlaksana dengan baik dan tidak terhambat karena pandemi COVID-19.

Namun, sebagai upaya pembinaan daerah secara langsung maka kegiatan ini juga megundang tatap muka secara terbatas, dengan menerapkan protocol kesehatan, beberapa pemerintah daerah yang berlokasi di sekitar Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah yang terundang tersebut menjadi semakin paham mengenai kelengkapan data teknis dan juga proses verifikasi data teknis jalan daerah ini. Pemerintah daerah ini diundang pada tanggal 26 Januari - 28 Januari 2021. Instansi yang diundang antara lain Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Satuan Kerja P2JN, SKPD Provinsi Jawa Barat, SKPD Kota Bekasi, SKPD Kabupaten Bekasi, SKPD Kota Tasikmalaya, SKPD Kabupaten Ciamis, dan SKPD Kota Sukabumi. Kegiatan

verifikasi data teknis secara tatap muka ini bertempat di Hotel Grand Zuri, Kota Tangerang Selatan.

Pembukaan awal pada kegiatan ini terdapat sambutan dan arahan oleh narasumber I yaitu Bapak Riono Suprapto, SE., ST., MT selaku Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, materi yang disampaikan yaitu hasil evaluasi Verifikasi Data Teknis Tahun Anggaran 2021 dimana terdapat 20 SKPD yang tidak mendapatkan alokasi untuk pekerjaan TA 2021 karena tidak adanya rekomendasi data teknis dan terdapat 17 SKPD yang mendapat potongan indeks untuk alokasi DAK TA 2021. Pada hasil Konsultasi Program DAK TA 2021 khususnya bidang jalan dan jembatan terdapat 520 SKPD yang mendapatkan DAK, yang selesai pembahasan Rencana Kegiatan hanya 509 SKPD. Arahan untuk kedepannya diharapkan seluruh SKPD paham dan tertib mengenai

kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan khususnya saat proses penentuan usulan kegiatan DAK dan PFID Bidang Jalan dan jembatan akan terus membimbing secara teknis terkait penentuan menu kegiatan, jenis penanganan, serta target penanganan.

Kegiatan ini dilanjutkan pemaparan oleh narasumber II yaitu Desi Meriana ST., MT., selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Pemrograman Jalan dan Jembatan. Materi yang disampaikan yaitu mengenai kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022. Poin-poin pembahasan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Fitur Baru SiPDJD TA 2021, input data kontrak dan dokumen kontrak survey kondisi jalan dan jembatan konsultan pihak ketiga sebelum daerah input data kondisi jalan.

PERENCANAAN DAK BIDANG JALAN TA. 2021W

KONDISI/TIPE PERKERASAN	ASPAL/PENETRASI/MAKADAM	BETON	TELFORD/KRIKIL/URPIL	TANAH/BELUM TUNTAS
BAIK				
SEDANG				
RUSAK RINGAN	PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN	PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN	REKONSTRUKTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN	
RUSAK BERAT	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN		PEMBANGUNAN JALAN

KETERANGAN

[Solid Black Box] = STATUS REJECT/DITOLAK

[Solid Green Box] = STATUS APPROVE/DITERIMA

Jenis perkerasan aspal/penetrası dan lataris/sandsheet dalam kondisi mantap tidak dapat diusulkan

Daerah hanya dapat mengusulkan ruas dengan status approve/diterima

2. Daerah sudah input data kondisi jalan ke SiPDJD sebelum asistensi ke P2JN/Balai sehingga dapat di cek kesesuaian antara data kondisi jalan manual dan data input.
3. SiPDJD akan dibuka tanggal 13 Januari 2021 pukul 00.01 WIB. Daerah dapat input kondisi jalan dan jembatan, pendanaan APBD dan tingkat keterhubungan.
4. Data kondisi jalan wajib di perbarui setiap tahunnya (Jalan nasional update 2x dalam setahun) dan terikat kontrak pekerjaan survey kondisi.
5. Tidak bisa satu kontrak survey kondisi jalan digunakan dalam 2x verifikasi data teknis (terdapat perubahanan kondisi jalan di permukaan aspal/beton kecuali tanah kondisi Rusak Berat yang tidak ada penanganan)
6. Data segmentasi kondisi jalan, tipe permukaan dan lebar jalan di SiPDJD wajib diisi semua untuk mempermudah proses verifikasi usulan DAK Bidang Jalan TA 2022.

Adapun peraturan saat pelaksanaan verifikasi data teknis yaitu :

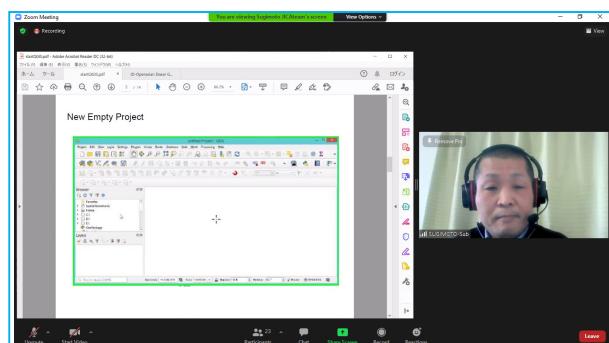
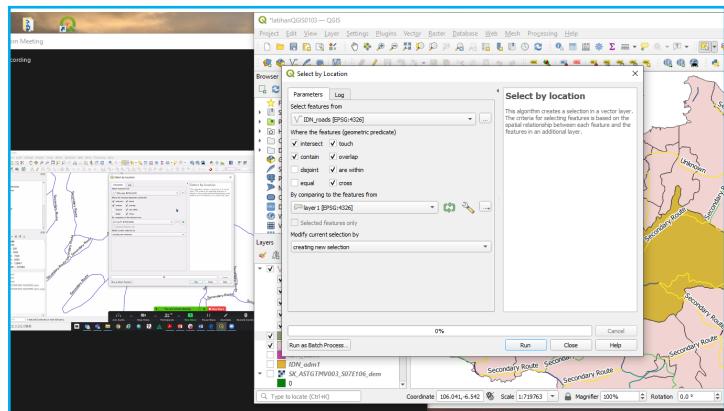
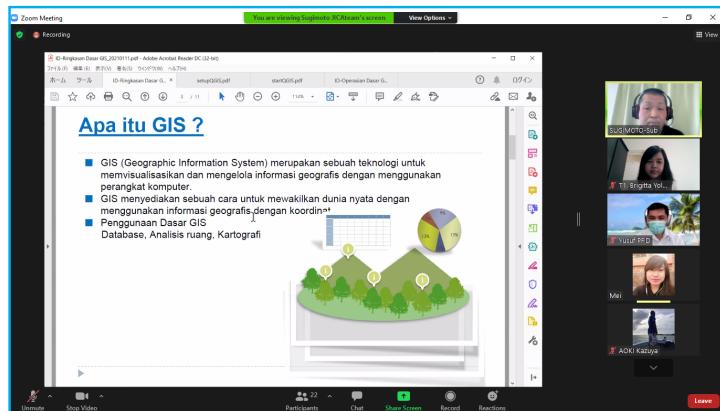
1. Jadwal verifikasi data teknis telah ditentukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur daerah bidang jalan dan jembatan sehingga SKPD tertib hadir sesuai dengan undangan yang telah disampaikan.
2. Kesempatan verifikasi data teknis adalah 3 kali (termasuk perbaikan, lebih dari 3 kali maka daerah sudah masuk penalti/pemotongan indeks teknis).
3. Permintaan revisi dari daerah hanya dapat dilaksanakan saat acara verifikasi data kondisi.
4. Untuk kesesuaian data kondisi, seluruh SKPD harap memperhatikan tabel berikut:

Pada kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Tahun 2021, arahan serta pembahasan yang dilakukan secara daring terlaksana dengan lancar dan untuk pertemuan dengan SKPD yang terundang secara tatap muka tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebagai hasil dari

kegiatan yang pertama ini, masih belum ada daerah yang berhasil terverifikasi. Hal ini terjadi karena masih ada perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing SKPD. Data teknis jalan daerah yang SKPD sampaikan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga SKPD yang belum terverifikasi tersebut akan mendapatkan kesempatan kembali dan menunggu undangan selanjutnya untuk Tahap Perbaikan I dan II. Kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah ini menjadi salah satu kegiatan pembinaan dari Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur daerah khususnya bidang jalan dan jembatan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Daerah *

KEGIATAN E-TRAINING GIS BERSAMA TIM JICA

Oleh : Brigitta Yolanda P.P, ST.



Kegiatan e-Training GIS melalui Aplikasi Zoom

Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan memiliki tugas dalam pengelolaan DAK di Bidang Jalan mulai dari perencanaan hingga pemantauannya. Namun tidak hanya itu, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan juga bertugas melakukan pembinaan terkait penyelenggaraan infrastruktur daerah serta berperan meningkatkan SDM pemerintah daerah. Sejak akhir tahun 2019, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan mendapatkan kepercayaan untuk bekerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency)

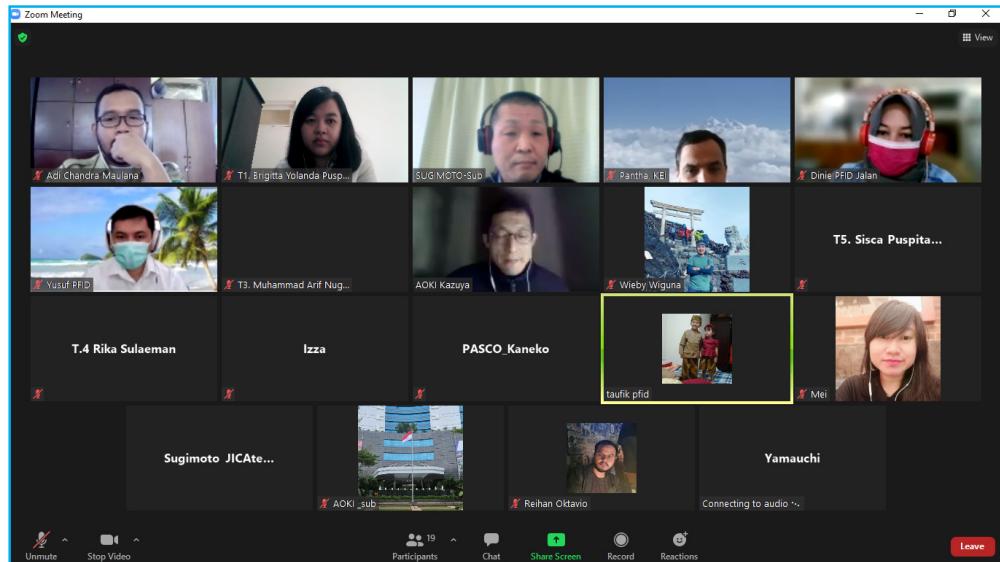
berkaitan dengan pendanaan hibah dengan judul kegiatan The Project of Improvement of Regional Roads Governance. Kegiatan ini melibatkan dua daerah yang menjadi pilot project, yaitu Kota Sukabumi dan Kota Tebingtinggi. Proyek ini terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Salah satunya secara rinci adalah pembangunan sistem basis data mengenai jalan daerah yang saling terhubung sehingga nantinya dalam akses kebutuhan untuk analisis dan pelaporan data untuk perencanaan penyelenggaraan jalan menjadi lebih mudah.

Dalam membangun sistem basisdata yang saling terkait itu, salah satunya adalah penyajian Sistem Informasi Geografis Jalan Daerah. Sehingga sebagai upaya transfer knowledge awal, maka dilaksanakan e-training GIS (Geographic Information System). Pelatihan ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan apli-

kasi Zoom dengan trainer dari tim JICA yaitu Mr. Sugimoto. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 1 dan 3 Maret 2021. Peserta dari pelatihan ini adalah unsur dari Kota Tebingtinggi, Kota Sukabumi, dan unsur PFID sendiri. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah para peserta dapat mengenal tentang Sistem Informasi Geografis dan nantinya dapat menyajikan peta jalan daerah yang lengkap dengan database yang sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan.

Isi materi pelatihan ini terdiri dari pengenalan GIS, pengenalan tentang layer, simbologi cara mengedit layer, dan pembuatan layout peta. Aplikasi yang digunakan adalah menggunakan Quantum GIS (QGIS). QGIS ini merupakan aplikasi pengolahan GIS berbasis open source dan sudah umum digunakan saat ini. Tentunya dengan aplikasi yang open source ini akan sangat menghindari adanya pemakaian aplikasi bajakan dan juga menghemat biaya karena seluruh update bisa dilakukan secara gratis dengan mengunduh pada situs resmi QGIS.



Kegiatan e-Training GIS melalui Aplikasi Zoom

Pada pengantar GIS, Mr. Sugimoto menjelaskan dasar-dasar tentang GIS. Mengapa GIS itu penting? Karena GIS menyediakan sebuah cara untuk mewakilkan dunia nyata dengan menggunakan informasi geografis dengan koordinat. Melalui GIS itu nanti akan terbentuk database yang dapat digunakan untuk melakukan analisis seperti menghitung berapa kilometer panjang jalan yang rusak, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perencanaan penyelenggaraan jalan. Tentunya pemerintah daerah membutuhkan keahlian ini agar perencanaan penyelenggaraan jalan setiap tahunnya menjadi lebih tepat dan bisa tervisualisasikan secara baik untuk kondisi jalan daerah yang membutuhkan penanganan. Tipe data GIS itu adalah titik, garis dan polygon. Kesemuanya itu memiliki nilai koordinat dan memungkinkan untuk merepresentasikan gambaran sebenarnya dari fitur yang ada di bumi menggunakan posisi koordinat aktual dan panjang atau luas. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa GIS menjadi hal yang penting untuk penyajian kondisi jalan daerah.

Setelah membahas mengenai pengantar GIS, selanjutnya adalah pengenalan tentang tools umum yang digunakan pada QGIS. Hal yang paling sering dilakukan adalah meng-input layer, menyesuaikan sistem koordinat yang cocok untuk wilayah Indonesia, kemudian melakukan edit pada garis seperti pemberian warna, penamaan jalan, dan sebagainya. Melalui pelatihan ini jadi lebih dimengerti bagaimana cara pengoperasian QGIS dan menambah ilmu mengenai pembuatan GIS.

Pelatihan ini dilakukan dengan interaktif, dimana para peserta langsung ikut mempraktikan arahan yang disampaikan oleh Mr. Sugimoto. Selain itu trainer juga langsung menanyakan kepada peserta hasil dari langkah-langkah yang diikuti oleh para peserta. Jika peserta tidak memahami salah satu langkah, maka bisa langsung bertanya kepada trainer. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan pelatihan ini.

Berdasarkan pendapat dari masing-masing peserta, baik dari Kota Sukabumi dan Kota Tebingtinggi, mereka sangat antusias mengikuti pelatihan seperti ini. Apalagi jika bisa dapat dilakukan secara tatap

muka karena peserta dapat berinteraksi secara langsung dan lebih rinci mendapatkan jawabannya. Namun ada beberapa saran seperti materi pelatihan ini ditambah menjadi lebih advance, seperti pembuatan peta sederhana dari hasil survey kondisi jalan dengan menggunakan GPS, atau melakukan digitasi secara langsung pada aplikasi QGIS. Materi tersebut perlu dilakukan karena merupakan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga masing-masing pemerintah daerah. Selain itu juga saat ini terdapat Kebijakan Satu Peta, dimana perlu ada penyajian peta, termasuk peta jalan daerah, dengan tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang perlu diverifikasi agar nantinya informasi peta tersebut juga dalam diintegrasikan dengan peta-peta lain dan dapat mendorong untuk pembangunan nasional. Tentu semuanya ini bisa menjadi perhatian bagi daerah-daerah lain juga untuk mendapatkan pemberian materi-materi, tidak hanya tentang GIS, agar dapat meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu juga bisa membuat tata kelola infrastruktur daerah menjadi lebih baik lagi *

KUNJUNGAN LAPANGAN DAK INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN TA. 2021

Oleh: Rethon Muliana C,
Afirma Kitania E



Kepala PFID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual

DAK TA. 2021 memiliki kegiatan baru yaitu DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan. DAK Integrasi ini memfokuskan penanganan di lokasi kumuh, sehingga luas permukiman kumuh dapat berkurang. Tujuan DAK Integrasi adalah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni sesuai dengan 4 (empat) indikator minimal rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi dan air minum. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur diatur sesuai dengan UU No. 1 Ta-

hun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam upaya mendukung mandat Sustainable Development Goals (SDGs). Kota Tual termasuk 11 lokasi pilot project DAK Integrasi TA. 2021.

Pada tanggal 2 Maret 2021, Kota Tual mengadakan acara Launching dan Ground Breaking DAK Integrasi TA. 2021 di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan. Acara launching dan ground breaking ini dibuka oleh Wali Kota Tual dan sambutan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau lokasi pilot project, mengetahui kesiapan pemerintah dan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan serta membantu

penyelesaian yang terjadi di lapangan. Lokasi penanganan kumuh di Kota Tual terletak di desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan luasan 8,08 Ha dan kategori kumuh sedang. Jumlah alokasi DAK yang didapat dalam penanganan permukiman kumuh terintegrasi ini yaitu Rp 18,3 Miliar untuk penanganan 300 Unit rumah, Rp 9,5 Miliar untuk penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, Rp 1,5 Miliar untuk penanganan bidang air minum dengan menu perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, dan Rp 1,8 Miliar untuk penanganan bidang sanitasi dengan menu Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal.



Kunjungan Lokasi dan Kondisi Infrastruktur Eksisting



Masyarakat telah terinformasi terkait pelaksanaan DAK Integrasi ini dan kerja sama dengan masyarakat selama masa persiapan sangat baik dan masyarakat menyambut baik rencana kegiatan DAK Integrasi ini. Selain sumber pendanaan DAK, penataan lingkungan di Desa Tual ini juga didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual yang dialokasikan untuk kegiatan bidang penerangan, dan lain - lain. Total bantuan DAK yang diterima untuk penanganan kawasan kumuh melalui program DAK Integrasi sebesar RP 31,1 Miliar.

Dengan adanya acara launching dan ground breaking DAK Integrasi ini, pemerintah daerah Kota Tual dapat segera melakukan pembangunan kegiatan DAK Integrasi. Pelaksanaan pembangunan ini harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati saat penyusunan rencana kegiatan DAK yang telah dilaksanakan pada T-1 (2020). Hal yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat adalah persiapan penyerapan dengan menyiapkan persyaratan penyaluran tahap I serta melaporkan progres



Wawancara Penerimaan Bantuan DAK Integrasi

kegiatan pada e-Monitoring DAK. Tidak lupa untuk terus berkoordinasi baik internal tingkat daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat selama masa pelaksanaan pembangunan kegiatan DAK Integrasi ini agar sasaran, mutu dan kualitas dapat tercapai sesuai yang diharapkan serta dapat selesai sesuai dan tepat waktu.

Desa Tual ini merupakan “wajah” Kota Tual, dimana langsung berbatasan dengan Kabupaten

Maluku Tenggara. Harapannya dengan tuntasnya masalah kumuh di Desa Tual ini, dapat menjadi wajah baru pintu masuk Kota Tual dan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan *

KICK OFF PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN TA. 2021

Oleh : Rethon Muliana C,
Afirma Kitania E



DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan TA. 2021 merupakan inovasi program Kementerian PUPR yang mengkolaborasikan atau mengintegrasikan pelaksanaan 3 (tiga) bidang DAK yaitu Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dalam satu kawasan permukiman. Tujuan DAK Integrasi adalah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni sesuai dengan 4 (empat) indikator minimal rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi dan air minum. Program ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang la-



yak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur diatur sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pada Bab VIII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam upaya mendukung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) pada Goals nomor 6,11, dan 12, maka pemerintah memiliki tugas untuk mendorong peningkatan mutu kehidupan

dan penghidupan masyarakat untuk mencegah berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Melalui serangkaian kegiatan seleksi yang sangat ketat dengan melakukan penilaian baik dari aspek adminisitasi hingga teknis untuk melihat kesiapan dan kelayakan pemerintah daerah, Kementerian PUPR bersama dengan

Bappenas dan Kementerian ATR telah dipilih 11 (sebelas) Kabupaten/Kota sebagai pilot project DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan TA. 2021. Diharapkan Pilot Project ini dapat berjalan dengan baik agar dapat direplikasi untuk Kabupaten/Kota lain pada tahun anggaran selanjutnya. Seleksi telah dilakukan jauh sebelum perencanaan DAK dimulai atau pada tahun n - 2. Penganggaran DAK dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Begitu pula dengan DAK Integrasi, proses pengusulan dilakukan sama dengan usulan kegiatan DAK yang lainnya namun menu dan lokasi sudah spesifik sesuai dengan hasil



 Tim Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan

pembahasan pada tahap seleksi pilot project DAK Integrasi. Penentuan alokasi berdasarkan hasil pembahasan ini dimaksudkan

agar penanganan kawasan kumuh dapat tertuntaskan sehingga tidak menyisakan kawasan kumuh pada kawasan yang akan ditangani.

Sebagaimana pengelolaan DAK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA. 2021, bahwa pemerintah daerah penerima alokasi DAK Fisik perlu melakukan penyusunan rencana. Untuk dapat memanfaatkan alokasi DAK, rencana kegiatan DAK yang disusun pemerintah daerah harus dibahas dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal penyusunan rencana kegiatan, 11 Kabupaten/Kota Pilot Project DAK telah melakukan pembahasan dan mendapat persetujuan Kementerian PUPR terkait dengan kelayakan dan kelengkapan Readiness Criteria. Berbekal rencana kegiatan yang telah disetujui, selanjutnya pemerintah daerah dapat melakukan pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan. Tahap pelaksanaan menjadi tahapan yang sangat penting karena menentukan keberhasilan program. Kementerian PUPR selaku pembina teknis dalam pengelolaan DAK khususnya program DAK Integrasi memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah. Maka untuk



 Tim Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan



Kegiatan Kick Off Pelaksanaan DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan

menyamakan prinsip antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pelaksanaan DAK Integrasi, diperlukan koordinasi awal sebelum pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan acara kick off kegiatan DAK Integrasi ini selama 2 (dua) hari pelaksanaan yang diawali dengan sambutan dan parparan pembukaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Selanjutnya pelaksanaan Kick Off Pelaksanaan DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan TA. 2021 dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber sebagaimana disebutkan sebelumnya. Setiap narasumber di berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk memaparkan bahan bahasan yang telah dipersiapkan. Selanjutnya diberikan waktu lebih kurang 1 (satu) jam yang diisi dengan diskusi dan pertanyaan oleh peserta. Pada sesi siang, dimulai sesi pemaparan yang dilakukan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang telah diberikan.

Sesi pleno dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021. Sesi ini sebagaimana disebutkan sebelumnya dimoderatori oleh Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan narasumber yaitu Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas. Beberapa poin pembahasan yang dibahas saat pleno yaitu:

- Penyaluran Tahap I telah dapat dilakukan dari Februari sampai 21 Juli 2021;
- Pemerintah perlu segera mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk melakukan penyaluran Tahap I;
- Proses input ke dalam OMSPAN masih belum dapat dilakukan pemerintah daerah dikarenakan OMSPAN masih dalam proses pembaharuan yang ditargetkan akan dapat beroperasi pada

minggu keempat bulan Februari 2021, dan lain lain;

- Kendala saat input input kegiatan dalam SIPD sehingga mempengaruhi proses penyaluran tahap I;
- Proses sertifikasi konsolidasi tanah yang cukup rumit karena saat berkoordinasi dengan kanthar didapatkan informasi bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pusat (Kementerian ATR/BPN); dan
- Koordinasi menyeluruh diperlukan baik di tingkat pusat, tingkat daerah, serta antar pusat dan daerah agar pelaksanaan DAK Integrasi tidak terhambat.

Sesi Pembahasan Desk 1

Sesi pembahasan desk 1 ini dilakukan selama 2 (dua) hari pelaksanaan. Pada hari pertama, pemaparan dan pembahasan desk dilaksanakan oleh Kota Langsa, Kota Tual, dan Kabupaten Kotabaru. Untuk hari kedua, pemaparan dan pembahasan untuk Kota Bontang dan Kota Tangerang *

SOSIALISASI E-MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] TAHUN ANGGARAN 2021 WILAYAH TENGAH

Bandung, 23 -24 Maret 2021



1. Pembukaan Sosialisasi E-Monitoring DAK Wilayah Tengah oleh Kepala Pusat PFID
2. Laporan Sub Koordinator Keterpaduan Perencanaan dan Program

SOSIALISASI E-MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA. 2021 BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR

Oleh : Hidemiwan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud meliputi 5 (lima) bidang, yakni

"Sosialisasi e-Monitoring DAK TA. 2021 mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK. Dalam tahap pelaporan, SKPD provinsi dan kabupaten/kota penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK disampaikan melalui E-Monitoring DAK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir."

Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan. Bidang Perumahan terdiri dari Subbidang Rumah Swadaya dan Subbidang Rumah Khusus.

Adapun salah satu proses dari tahapan pengelolaan penyelenggaraan DAK fisik bidang Infrastruktur PUPR adalah pelaporan. Pelaporan merupakan kriteria teknis yang digunakan sebagai komponen penilaian teknis sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 8 tahun 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegi-

atan yang didanai DAK melalui aplikasi e-Monitoring DAK. e-Monitoring DAK adalah aplikasi yang dimiliki kementerian dalam rangka pemantauan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan DAK Infrastruktur. Dalam tahap pelaporan, SKPD provinsi dan kabupaten/kota penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK disampaikan melalui E-Monitoring DAK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Adapun waktu pelaporan triwulan DAK meliputi :

1. Triwulan pertama pertanggal 31 Maret;

SOSIALISASI E-MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] TAHUN ANGGARAN 2021 WILAYAH TENGAH



Bandung, 23 -24 Maret 2021



Narasumber Sosialisasi E-Monitorik DAK TA. 2021



Sesi Diskusi dengan Peserta E-Monitorik DAK TA. 2021

2. Triwulan kedua pertanggal 30 Juni;
3. Triwulan ketiga pertanggal 30 September; dan
4. Triwulan keempat pertanggal 31 Desember.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2021 bahwa pemanfaatan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Agar pelaksanaan infrastruktur daerah Kementerian PUPR lebih efektif maka dibentuk Unit Organisasi Baru yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan infrastruktur kewenangan daerah, yaitu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID).

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 bertugas memfasilitasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruk-

tur daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR No. 8 tahun 2020, maka Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan Sosialisasi e-Monitoring DAK TA. 2021 yang dibagi menjadi 3 (Tiga) Wilayah yaitu wilayah Barat, wilayah Timur, dan wilayah Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar SKPD provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK menyampaikan laporan triwulan pertama penyelenggaraan DAK TA. 2021 melalui e-Monitoring DAK. Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah.

WILAYAH BARAT

Wilayah Barat dilaksanakan pada 16 - 17 Maret 2021 dengan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah dan Balai/Satker Wilayah Sumatera . Dengan rincian

sebagai berikut :

- a. Sebanyak 148 Dinas Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Barat;
- b. Sebanyak 46 Balai/Satker Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Barat.

Metodelogi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Wilayah Barat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu tatap muka secara langsung dan video conference melalui Aplikasi Zoom yang bertempat di Hotel Ciputra Jakarta serta dengan ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19. Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dirancang dalam bentuk Class Room.

WILAYAH TIMUR

Wilayah Timur dilaksanakan pada 18 - 19 Maret 2021 dengan melibatkan peserta dari Peme-



Foto bersama peserta offline kegiatan E-Monitoring DAK TA. 2021 Bidang Infrastruktur PUPR

rintah Daerah dan Balai/Satker Wilayah Sulawesi, Wilayah Nusa Tenggara Barat, Wilayah Nusa Tenggara Timur, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua . Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 170 Dinas Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Timur;
- b. Sebanyak 60 Balai/Satker Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Timur.

Metodelogi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Wilayah Timur dilaksanakan dengan 2 cara yaitu tatap muka secara langsung dan video conference melalui Aplikasi Zoom yang bertempat di Hotel Ciputra Jakarta serta dengan ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19. Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dirancang dalam bentuk Class Room.

WILAYAH TENGAH

Wilayah Tengah dilaksanakan pada 23 - 24 Maret 2021 dengan melibatkan peserta dari Pemerintah Daerah dan Balai/Satker Wilayah Jawa, Wilayah Bali, dan Wilayah Kalimantan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 189 Dinas Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Tengah;
- b. Sebanyak 51 Balai/Satker Pengampu DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan wilayah Tengah.

Metodelogi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Wilayah Tengah dilaksanakan dengan 2 cara yaitu tatap muka secara langsung dan video conference melalui Aplikasi Zoom yang bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung serta dengan ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19. Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dirancang dalam bentuk Class Room.

Adapun pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 di 3 wilayah dilaksanakan dengan rundown acara yang sama yaitu selama 2 (hari). Pada hari pertama, para peserta dipersilahkan untuk melakukan registrasi kemudian dilanjut dengan pembukaan acara oleh Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bp. Riono Suprapto, SE. ST. MT. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi Materi Substansi

e-Monitoring DAK SDA, Materi Substansi e-Monitoring DAK Jalan dan Jembatan, Materi Substansi e-Monitoring DAK Perkim, dan Materi Teknis e-Monitoring DAK oleh Tim Teknis. Kemudian acara terakhir pada hari pertama adalah Sosialisasi Pengisian Aplikasi e-Monitoring DAK. Pada hari kedua, acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Pengisian Aplikasi e-Monitoring DAK dan ditutup oleh panitia. Adapun seluruh materi yang disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi e-Monitoring Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Wilayah Barat dapat diunduh melalui bit.ly/materiemeonDAK.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum telah memberi manfaat yang besar bagi daerah maupun bagi Pemerintah Pusat, antara lain untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan, mempertahankan kondisi prasarana irigasi, meningkatkan pelayanan prasarana air bersih dan pembenahan sistem sanitasi, meningkatkan rumah layak huni, mengurangi backlog perumahan, kapasitas fiskal daerah, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *



HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2021

Oleh : Indra Jaya Krisna Gede Prabowo

Optimalisasi pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi perhatian utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik bagi masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pembangunan Infrastruktur kewenangan Pemerintah Pusat baik dalam kegiatan sosialisasi kebijakan sampai dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dalam pelaksanaannya seringkali mengalami perubahan kebijakan, diantaranya adalah perubahan pada menu kegiatan dan rincian kegiatan. Perubah-

"Finalisasi Penyusunan Draft Petunjuk Operasional Penyelegaraan DAK Infrastruktur TA. 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melibatkan peserta dari Unit Organisasi teknis bidang Jalan dan Jembatan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Permukiman guna memberikan informasi pelaksanaan DAK yang akan digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Good Government."

an kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaraan DAK tahun sebelumnya serta kebutuhan daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas nasional. Sehubungan dengan telah dilakukannya Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA. 2021 dan akan dimulainya kegiatan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021, maka perlu disusun peraturan mengenai petunjuk operasional untuk mengatur penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021.

Mekanisme pengalokasian DAK didasarkan melalui usulan daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara alokasi DAK dengan kebutuhan daerah. Beberapa mekanisme pengusulan telah dilakukan dan yang terakhir pengusulan kegiatan DAK diusulkan pemerintah daerah melalui aplikasi KRISNA DAK yang telah dilakukan sejak pengalokasian DAK TA. 2020 hingga saat ini. Usulan pemerintah daerah yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK akan diverifikasi dan dibahas bersama antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis terkait dengan Pemerintah Daerah.



Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan DAK yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai tahap penyelesaian 100%, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan DAK berguna untuk mencocokan data pada saat pemerintah daerah mengajukan perencanaan dengan hasil akhir pelaksanaan DAK sehingga diharapkan tidak adanya perbedaan saat penyusunan perencanaan dan hasil akhir.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, dilakukan pula pembuatan dokumentasi berupa video sebagai bagian dari pertanggungjawab kepada masyarakat (Good Government). Good government sendiri merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (akuntabilitas) sejalan dengan prinsip demokratis, efektif dan efisien. Selain itu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah diha-

rapkan juga mengandung prinsip mengikutisertakan masyarakat dan swasta (partisipasi), terbuka (transparansi), kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur TA.2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melibatkan peserta dari unsur Unit Organisasi teknis bidang jalan dan jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, dan permukiman di lingkungan Kementerian PUPR serta Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Rapat Finalisasi Penyusunan Draft Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur TA.2021 dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Aviary

Bintaro pada tanggal 21-22 Januari 2021 dengan ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai anjuran Pemerintah, serta melalui Video Conference menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta yang tidak dapat datang, mengingat kondisi pandemik Covid-19 yang mengharuskan adanya pertemuan dengan jumlah orang yang terbatas.

Pelaksanaan diawali dengan sambutan dan paparan pembukaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dilanjutkan dengan cara Forum Group Discussion (FGD). FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Pendapat yang diberikan dari berbagai wakil Unit Organisasi yang datang akan ditampung dan dikaji selanjutnya akan menjadi masukan pada Draft Petunjuk Operasional. Peserta, diberikan bahan Draft Petunjuk Operasional dalam bentuk hardcopy dan softcopy *

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KAMPUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



 Gelombang I Dosis 1
Tanggal 23-24 Februari 2021



 Gelombang I Dosis 2 Tanggal 23-24 Februari 2021







IMSAKIYAH

RAMADHAN 1442 H / 2021 M

UNTUK WILAYAH JAKARTA DAN SEKITARNYA

No.	Hari	Tanggal	Imsak	Shubuh	Terbit	Dhuha	Zhuhur	'Ashr	Maghrib	'Isha
1	Selasa	13 April	04:28	04:38	05:51	06:18	11:57	15:14	17:56	19:05
2	Rabu	14 April	04:28	04:38	05:51	06:18	11:56	15:14	17:55	19:05
3	Kamis	15 April	04:28	04:38	05:50	06:18	11:56	15:14	17:55	19:04
4	Jum'at	16 April	04:28	04:38	05:50	06:18	11:56	15:14	17:55	19:04
5	Sabtu	17 April	04:28	04:38	05:50	06:18	11:56	15:14	17:54	19:04
6	Ahad	18 April	04:28	04:38	05:50	06:18	11:56	15:14	17:54	19:03
7	Senin	19 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:53	19:03
8	Selasa	20 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:53	19:03
9	Rabu	21 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:53	19:02
10	Kamis	22 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:52	19:02
11	Jum'at	23 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:52	19:02
12	Sabtu	24 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:55	15:14	17:52	19:01
13	Ahad	25 April	04:27	04:37	05:50	06:18	11:54	15:14	17:51	19:01
14	Senin	26 April	04:26	04:36	05:50	06:18	11:54	15:14	17:51	19:01
15	Selasa	27 April	04:26	04:36	05:50	06:18	11:54	15:14	17:51	19:01
16	Rabu	28 April	04:26	04:36	05:50	06:18	11:54	15:14	17:50	19:01
17	Kamis	29 April	04:26	04:36	05:50	06:18	11:54	15:14	17:50	19:01
18	Jum'at	30 April	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:14	17:50	19:00
19	Sabtu	1 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:14	17:50	19:00
20	Ahad	2 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:14	17:49	19:00
21	Senin	3 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:14	17:49	19:00
22	Selasa	4 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:14	17:49	19:00
23	Rabu	5 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:13	17:49	19:00
24	Kamis	6 Mei	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:13	17:49	19:00
25	Jum'at	7 Mei	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:49	19:00
26	Sabtu	8 Mei	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	18:59
27	Ahad	9 Mei	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	18:59
28	Senin	10 Mei	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	18:59
29	Selasa	11 Mei	04:25	04:35	05:50	06:19	11:53	15:13	17:48	18:59
30	Rabu	12 Mei	04:25	04:35	05:50	06:19	11:53	15:13	17:48	18:59